

Dampak Sosial Ekonomi, Budaya terhadap Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pulau Terluar Kabupaten Natuna

Syahdanur^{1*}; Hasim As'ari²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Indonesia

* E-mail: syahdanur@eco.uir.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Syahdanur & As'ari, H 2017, 'Dampak sosial ekonomi, budaya terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya laut di pulau terluar kabupaten natuna', Jurnal Ekonomi KIAT, vol. 29, no. 2, hal. 1-7.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@journal.uir.ac.id

Di bawah lisensi:

Creative Commons Attribute-ShareAlike 4.0 International Licence

ABSTRAK

The condition of the people in the outer islands is far from development connectivity, and the limited touch of development, making the condition and economy of the community do not experience development so as not to support the economic progress of the community so that this study raises the social, economic and cultural conditions of the community to achieve successful management of marine resources. This research was conducted in Natuna Regency, especially the people in Outermost Islands, using qualitative research methods to describe the natural phenomenon of research so that it can describe the actual conditions. The results of the study illustrate that social, economic, cultural conditions influence the success of management of marine resources, so that planning becomes a policy that is consistent with the conditions and needs of the community. To achieve successful management of marine resources must be in accordance with the conditions of human resources where the policy will be determined.

Katakunci: *Planning, Policy, Resources, Outermost Islands*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga dikenal dengan maritime terbesar dengan limpahan sumber daya alam khususnya dari sector perikanan dan sumber daya laut lainnya. Melimpahnya potensi sumber daya laut menjadikan sektor kelautan harus menjadi penopang untuk kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan atau masyarakat yang kehidupannya ketergantungan dengan sector laut.

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau daerah yang 96 persennya lautan memiliki potensi besar di bidang maritime atau sector kelautan. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang berbatasan laut dengan beberapa Negara dengan potensi perikanan yang sangat besar. Sehingga potensi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sering dijadikan lahan pencuri ikan/illegal fishing dari berbagai Negara yang sudah barang tentu merugikan potensi negara.

Potensi penangkapan *illegal fishing* ini banyak terjadi di Laut Natuna Utara yang meliputi perairan laut Kabupaten Natuna dan juga Laut Perikanan Kabupaten Anambas. Sehingga potensi perikanan di dua kawasan tersebut harus membawa manfaat dan peningkatan masyarakat di dua kawasan terluar Indonesia.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa laut merupakan aset yang penting sebagai salah satu penopang pembangunan nasional demi mencapai

kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini telah direalisasikan melalui pencantumannya dalam berbagai dokumen penting perencanaan pembangunan yang sah. Salah satu bukti pentingnya peran sektor perikanan dan kelautan bagi kelangsungan pemba-ngunan nasional tersebut dapat dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 sebagai bagian utama pada UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007. Kebijakan ini menekankan bahwa pembangunan pada sector kelautan merupakan salah satu lokomotif pembangunan dan dituangkan secara spesifik pada misi ke- 7 dan ke- 8 yakni tentang pentingnya peningkatan daya saing pembangunan sector kelautan dan perikanan menjadi sector unggulan untuk mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karenanya pembangunan pada sector kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan pengelo-laannya terlebih lagi pada wilayah paling strategis seperti gugusan pulau-pulau kecil dan berbatasan dengan wilayah negara lain.

Penekanan penelitian ini juga pada kondisi strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan pada wilayah pulau terluar merupakan beranda terdepan sebagai tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada titik strategis tersebut kondisi yang ada masih menunjukkan deskripsi paradoksial pembangunan dan peningkatan ekonomi serta berbagai sumber daya laut penopang perkeonomian masyarakat

pulau. Dengan kenyataan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan wilayah yang kaya sumber daya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini pembangunan pulau-pulau terluar belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain secara geografis lokasi pulau terluar tersebut sulit dijangkau, adanya keterbatasan skala usaha, metode pemanfaatan sumber kekayaan laut yang belum efektif, terbatasnya sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam yang tersedia. Berbagai hambatan ini sebenarnya dirasakan semakin sulit karena upaya pengembangan maupun pengelolaan yang dilaksanakan selama ini masih bersifat parsial, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum dapat dioptimalkan.

Kondisi tersebut jelas menggambarkan belum terfokusnya pembangunan, pemanfaatan, serta pemanfaatan yang berorientasi kepada kepentingan besar masyarakat local atau masyarakat dipulau terluar, sebagai upaya menganggak seradajat perekonomian dan kehidupan masyarakat di daerah pulau terluar khususnya masyarakat di Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten terdepan Indonesia yang berada di Laut Natuna.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di pulau terluar merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (yakni secara spesifik tertinggal dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), termasuk akses masyarakat ke luar daerah serta akses antar daerah termasuk tertinggal secara kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya di Indonesia. Kondisi masyarakat pesisir ataupun masyarakat nelayan di berbagai kawasan terpencil umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta lemahnya fungsi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), lembaga keuangan mikro, atau kapasitas berorganisasi masyarakat (Kusnadi, 2006).

Tujuan pembangunan nasional secara ideal tentu akan bersandarkan pada asas pemerataan, sedangkan dalam prosesnya diperlukan format khusus pelaksanaan efektif, efisien dan berkeadilan. Untuk itulah sangat rasional ketika pembangunan nasional menginginkan adanya pencapaian *output* dan *outcomes* pembangunan, maka dalam prosesnya akan diwarnai dengan praktek implementasi kebijakan pembangunan di daerah terluar sebagai beranda depan pembangunan nasional yang ada diperbatasan laut, maupun aktivitas manajemen pembangunan secara operasional yang juga sinkron dengan tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Kondisi yang telah tergambar melahirkan penelaahan terhadap problema pembangunan di terluar dan terdepan yang masih tertinggal dengan wilayah lain di Indonesia, akan menggambarkan tingkat urgensi

yang cukup diperlukan sebagai upaya perbaikan yang komprehensif terhadap praktek pembangunan ekonomi sebagai ujung keputusan dan harapan masyarakat sehingga dalam lingkup pencapaian tujuan pembangunan yang merata hingga menyentuh kepada pelosok wilayah pulau terluar. Pemikiran inilah yang secara esensial dari penelitian ini.

Penelusuran terhadap berbagai dokumen agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025, RPJMN Tahun 2014-2019 yang memuat visi pembangunan saat ini sampai kepada Rencana Strategis Kementerian terkait, penelitian ini meletakkan perhatiannya kepada salah satu titik lokasi paling strategis sesuai dinamika pembangunan nasional di kawasan pulau-pulau wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Natuna sebagai pelaksanaan beberapa kebijakan prioritas pembangunan di wilayah ini ditentukan oleh situasi dan kondisi politik, pertahanan dan keamanan nasional yang juga memiliki keterkaitan dengan perikehidupan negara tetangga., maka kekuatan ekonomi masyarakat harus menjadi kekuatan nasional dan wawasan kebangsaan.

Mendalami permasalahan yang menjadi fokus utama pemikiran dalam desain penelitian ini tentu memerlukan suatu konfirmasi terhadap penyebab terjadinya ketidakmampuan masyarakat lokal untuk mengakses potensi laut sebagai potensi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pengelolaan sumber daya alam berupa potensi lautan atau perikanan baik tangkap maupun budidaya sehingga penelitian menguraikan bagaimana potensi sumber daya laut tersebut menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di pulau terluar khususnya masyarakat Kabupaten Natuna.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam ilmu manajemen publik, dan secara praktis hasil penelitian memberikan gambaran terhadap kondisi tentang pentingnya pengelolaan sumber daya laut sebagai aplikatif kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dipulau terluar.

2. Telaah Pustaka

Berbicara pengelolaan sumber daya laut tentu saja bukan hanya menyangkut manajemen ataupun manajerial akan tetapi pengelolaan sumber daya laut adalah berbicara manajerial dan kebijakan pemerintah. Artinya pengelolaan sumber daya laut supaya dapat menghasilkan *infact* bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan adalah upaya bersama dari system manajerial dan kebijakan yang timbul karena aturan yang harus dipenuhi yakni berupa kebijakan kemudian ditopang dengan system manajemen. Sehingga berbicara pengelolaan berkaitan dengan sebuah keputusan yang harus dilaksanakan, maka pelaksanaannya

agar efektif diperlukan manajerial. Namun dalam hal bagaimana pengelolaan sumber daya laut ini sangat dominan dengan aspek kebijakan yang dilahirkan oleh keputusan pimpinan instansi yang memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut.

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *policy*. *Policy* dalam kamus dimaknai sebagai: “*a set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed officially by a group of people, a business organisation, a government or a political party.*” (Walter, 2008). Definisi ini tentu masih sangat bersifat umum tetapi satu hal yang penting bahwa kebijakan selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari istilah tersebut jelas tergambar bahwa masyarakat atau publiklah yang akan terlibat untuk menerima kebijakan yang cakupannya sangat luas dalam berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum.

Laswell dan Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Kebijakan terkadang dipandang sebagai suatu proses dengan pusat perhatian yang tertuju kepada siklus kebijakan, meskipun terkadang tidak berjalan secara linier, simultan dan cenderung kaku. Menurut Nakamura & Smallwood (1980) dalam pandangannya bahwa pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Menurut Dunn (2000) siklus kebijakan itu terdiri atas “*Agenda setting policy formulation, policy adoption, policy assessment*”. Pada garis besarnya kegiatan-kegiatan utama dari siklus kebijakan terdiri dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi (Mustopadidjaja, 1998). Hoogerwerf (1983) menegaskan agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan ini harus dilaksanakan.

Banyak permasalahan ataupun ketidakpuasan dalam masyarakat sebagai dampak lahirnya kebijakan, namun tidak semua permasalahan dapat dikategorikan sebagai masalah umum. Jones dalam Dunn (1981) mengemukakan bahwa “*a policy problem is an unrealized value, need or opportunity which, however identified, maybe attained through public action*”. Kebijakan dapat terealisasi apabila kebijakan itu dibutuhkan oleh masyarakat, artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus men-cerminkan kehendak atau kepentingan masyarakat, karena kebijakan muncul didahului oleh tindakan-tindakan publik, sehingga keberhasilan kebijakan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. David G. Smith dalam Anderson (1979) mengemukakan : “*For policy purposes, a problem can be formally defined as condition or situation that procedures needs or dissatisfactions on the part of people for which relief or redress is sought. This may be done by those directly affected or by other acting on their behalf*”.

Untuk kepentingan suatu kebijakan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang melahirkan ketentuan-ketentuan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk itu perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Islamy (2001) kebijakan publik tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan publik. Selain itu setiap kebijakan harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

R. Dye (1995) menjelaskan kebijakan publik erat kaitannya dengan pemerintah sebagai berikut: “*Public policy is whatever government chose to do or not to do*”. Berpijak pada pendapat pakar tersebut kebijakan publik erat kaitannya dengan suatu bentuk tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak hanya semata-mata apa yang diinginkan oleh pemerintah atau pejabat publik. Anderson (1978) kebijakan publik juga merupakan kebijakan-kebijakan yang dikem-bangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jones (1977) kebijakan publik adalah tindakan pemerintah terhadap permasalahan publik yang mencakup komponen-komponen; 1) *Goals* atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai; 2) *Plans/proposals* atau rencana-rencana atau proposal yang merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut; 3) *Programs* atau program-program yang merupakan alat formal untuk mencapai tujuan; 4) *Decisions* atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; 5) Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama ataupun dampak sampingan.

Dari pemikiran para ahli maka kebijakan adalah sebuah rencana yang ingin dicapai dari sebuah keputusan, Akan tetapi rencana (kebijakan) tidak berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan atau diimplementasi dalam kebijakan, sehingga kebijakan dan implementasi merupakan kesatuan tindakan dalam manajemen. Robbins and Coulter (2010) Manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain, begitu juga pendapat Wilson (2012) “Manajemen adalah sebagai sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi.

Proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan sistematis mencakup serangkaian kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan, peraturan, perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, Grindle (1980) mengungkapkan “*In general, the last of implementation into establish a link that allows the*

goals of public politics policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a "policy delivery system", I which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. Thus, public policies-board statements of goals, objectives, and means-are translated into action programs that aim to achieve the ends stated in the policy. It is apparent, then, that a variety of programs may be developed in response to the same policy goals. Action programs themselves may be disaggregated into more specific projects to be administered. The intent of action programs and individual projects is to cause a change in the policy environment, a change that can be considered an outcome of the program.

Akhir dari implementasi dalam membangun jaringan yang memungkinkan tujuan dari politik kebijakan publik direalisasikan dari sebuah tata-tan pengelolaan atau manajerial adalah sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Ini melibatkan dan sangat penting dalam pembentukan "sistem penyampaian kebijakan", yang berarti secara khusus dirancang dan dicapai sesuai dengan harapan awal di rancangannya kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik dan implementasi harus mampu mencakup pernyataan tujuan, sasaran, dan sarana-dijabarkan ke dalam program aksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), dampak dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik telah menjadi fokus perhatian banyak orang selama dekade terakhir. Komparasi kebijakan publik dan politik negara telah mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan terhadap output kebijakan. Meskipun dampak dari faktor-faktor pada pelaksanaan keputusan kebijakan telah mendapat perhatian, kebijakan itu mungkin memiliki efek mendalam pada kinerja instansi pemerintah sebagai instansi perencana dan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa untuk tujuan ilustrasi, diusulkan bahwa pertimbangan diberikan pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dalam pelaksanaan kebijakan yang berlangsung. Sehingga diharapkan kebijakan Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah: 1) Apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam yurisdiksi pelaksana kebijakan cukup untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2) Untuk sejauh mana (dan bagaimana) kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan terpengaruh oleh pelaksanaan kebijakan tersebut; 3) Apa yang menjadi opini publik, dan bagaimana opini tersebut menonjol menjadi isu yang terkait dengan kebijakan; 4) Apakah elit mendukung atau menentang pelaksanaan kebijakan; 5) Karakter partisan apa dari yurisdiksi pelaksanaan, apakah ada oposisi partisan atau dukungan untuk poli; 6) Sampai sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan lingkungan kebijakan yang timbul sebagai konsekuensi logis dari proses implementasi kebijakan. Karena itu, kondisi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik dapat saja mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dan dalam keterpengaruhannya itu bisa saja terjadi disposisi para pelaksana kebijakan. Mengenai disposisi para pelaksana kebijakan ini, Van Meter dan Van Horn (1975) *Each of the components of the model discussed above must be filtered through the perceptions of the implementer within the jurisdiction where the policy is delivered. Their elements of the implementers' response may affect their ability and willingness to carry out the policy: their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.*

3. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan kualitatif berusaha menawarkan dan membangun pola kerja konstruktif atau naturalistik atau interpretatif (Cresswell, 2003). Sehingga kerangka kerja naturalistik (alamiah) yang optimal akan mampu memahami dan memberikan interpretasi-interpretasi terhadap fenomena yang dilihat sesuai pandangan yang diberikan para pihak *stakeholder*, informan penelitian (Denzin dan Lincoln, 1994). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil penelitian, dan data primer sebagai pendukung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, *Focus Group Discussion* dengan *stakeholders* yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kebijakan, penerima kebijakan serta observasi lapangan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan merupakan serentetan perencanaan yang disusun untuk diimplementasikan atau diaktualisasikan dalam organisasi. Sumber daya alam dalam konteks penelitian ini adalah sumber daya laut sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat di pulau terluar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga memenuh Van Metter dan Van Horn Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus memperhatikan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya laut.

Sehingga dalam aktualisasi atau implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya laut supaya melahirkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan perhatiann menilai bagaimana perencanaan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan dalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah

ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dasar dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Rusli (2013) lingkungan kebijakan adalah sebuah sistem yang lebih besar yang melingkupi dan karenanya memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang menjadi sub sistem yang ada di dalamnya. Ada bermacam-macam jenis lingkungan kebijakan, dan beberapa diantaranya saling berimpitan dengan proses mempengaruhi sub sistem di dalamnya. Lingkungan kebijakan itu secara umum dapat digolongkan menjadi dua komponen besar yaitu lingkungan kebijakan yang sifatnya fisik dan lingkungan kebijakan yang sifatnya non fisik (sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya). Beranjak dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya laut bagi kepentingan masyarakat pulau terluar Natuna itu, tidak hanya bersumber dari faktor internal (implementor kebijakan) tetapi juga lingkungan eksternal, yang pada tataran tertentu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kondisi yang sama juga berlaku bagi seluruh program pembangunan lainnya yang diprakarsai secara sentralisasi oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan di Kabupaten Natuna.

Dari hasil penelitian didapat 2 (Dua) klasifikasi hasil terhadap pengaruh situasi ekonomi dan determinasi faktor sosial politik terhadap upaya mensukseskan implementasi pengelolaan sumber daya laut di pulau terluar Natuna.

4.1. Determinasi kondisi ekonomi

Banyak faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu upaya pembangunan secara nasional, akan tetapi penelitian hanya memfokuskan pada beberapa indikasi saja seperti kenaikan harga pokok atau lazim disebut sebagai Inflasi dan kelangkaan barang karena distribusi yang tidak lancar. Hal ini merupakan penguatan Analisa terhadap hasil penelitian yang keseluruhannya menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi kekhawatiran masyarakat nelayan di Kabupaten Natuna.

Inflasi merupakan faktor fundamental makro dari indikator makroekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, karena harga-harga barang secara umum meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Harga barang-barang akan selalu mengalami suatu perubahan, biasanya berupa kenaikan. Namun jika kenaikan itu hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi. Perubahan yang berupa kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung terus menerus, dalam istilah ekonomi disebut dengan inflasi.

Jika kita berbicara tentang inflasi, maka yang diperhatikan bukanlah perubahan harga-harga dari

berbagai barang, akan tetapi perubahan rata-rata yang berlaku. Dimana besarnya nilai atau tingkat inflasi menggambarkan, dalam satu periode tertentu (tahunan, bulanan) secara rata-rata kenaikan harga-harga dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Sehingga semakin tinggi inflasi secara rata-rata kenaikan harga barang-barang semakin tinggi, dan kondisi seperti ini akan menurunkan kegiatan investasi.

Demikian juga pengaruhnya terhadap kelangsungan aktivitas masyarakat nelayan di Kabupaten Natuna. Kenaikan harga-harga yang tinggi akan menyebabkan inflasi tinggi, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan harga jual barang-barang produksi naik, dan hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan riil masyarakat juga menurun. Menurunnya daya beli masyarakat mengakibatkan menurunnya penjualan dari masyarakat yang berdagang di sana, dan menurunnya penjualan akan menurunkan keuntungan yang berdagang di sekitar masyarakat nelayan di Natuna. Jika keuntungannya menurun, maka dapat dikatakan bahwa produktivitas masyarakat cenderung mengalami penurunan.

Menurunnya produktivitas masyarakat nelayan karena dampak inflasi akan turut menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya laut Natuna. Dengan keberadaan kondisi yang demikian pemerintah perlu memikirkan cara terbaik mengatasi persoalan ini. Karena inflasi berarti tidak ada satupun masyarakat atau kelompok pengusaha di wilayah Kabupaten Natuna dapat menghindari dampak terjadinya inflasi. Kondisi ini akan berpengaruh pada ketersediaan modal yang diperlukan untuk melaut, karena banyak kelompok nelayan tidak dapat beroperasi secara maksimal karena kebutuhan keluarga yang juga turut mengalami tekanan yang sedemikian rupa. Artinya situasi inflasi yang terjadi baik dalam cakupan daerah maupun secara nasional juga tetap memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keberlanjutan kebutuhan masyarakat nelayan. Dinamika situasi perekonomian seperti fenomena inflasi dan langkanya barang kebutuhan rumah tangga sering dirasakan sehingga terkadang melemahkan kemampuan membeli masyarakat. Meski tidak dapat dijustifikasi sebagai faktor yang signifikan mempengaruhi kinerja implementasi pengelolaan sumber daya laut, namun kondisi yang demikian membawa dampak psikologis yang nyata bagi masyarakat Nelayan di Natuna.

4.2. Determinasi kondisi sosial politik terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya laut

Aspek sosial politik tidak bisa dihindarkan dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Natuna. Aspek sosial dan politik tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. misalkan Kebijakan pemerintah Malaysia yang juga merupakan negara

terdekat dengan wilayah Timur Natuna juga memberlakukan kebijakan pengembangan home industry yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari seperti produk makanan. Karena kedekatan secara geografis ini sebenarnya memungkinkan masyarakat nelayan Natuna untuk melakukan perdagangan antar negara menggunakan jalur pelayaran tradisional, sehingga khusus pada wilayah gugus kepulauan Natuna yang berada di sebelah timur, tukar menukar barang atau "barter" masih dipandang sebagai suatu hal yang biasa dan telah berlangsung sangat lama. Hal inilah yang menguatkan asumsi penelitian bahwa faktor ini tidak dapat dikesampingkan dalam proses Analisa sehingga kemudian perlu dibahas sedemikian rupa sehingga menggambarkan pengaruh yang meski tidak signifikan secara langsung terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya laut Natuna. Namun demikian perlu juga dipandang menjadi kekuatan endogenous bagi keberlanjutan pelaksanaannya bagi masyarakat di Natuna. Akan tetapi beberapa perkembangan terakhir justru menjelaskan adanya informasi bahwa pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga tersebut justru sedang dilanda isu miring tentang konflik Laut China Selatan yang kini berubah jadi laut Natuna Utara.

Dinamika pengelolaan sumber daya laut yang mendorong banyaknya illegal fishing yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan dalam pengelolaan ekonomi sumber daya laut. Eskalasi tersebut tersebut juga berdampak meluas hingga berpotensi mengganggu kepentingan nasional negara-negara yang bahkan tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, namun Indonesia memiliki kepentingan kedaulatan negara dan pengelolaan serta pengamanan sumber daya laut yang menjadi hak kedaulatan negara. Hal lain yang menjadi perhatian dalam penelitian adalah pemberitaan mengenai isu klaim China atas kepulauan Natuna sedikit banyak berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini disikapi pemerintah dengan menjadikan Kabupaten Natuna sebagai pusat pertahanan dengan ditempatkan militer tidak lain sebagai upaya melindungi sumber daya laut untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Hasil penelitian mengkonfirmasi tidak didapatkan adanya masyarakat yang merasa takut melaut atau sebagainya. Hanya saja masyarakat nelayan sebenarnya mulai menaruh perhatian terhadap kebijakan internal Pemerintah untuk menambah kekuatan pertahanan di Kabupaten Natuna. Meski demikian situasi seperti ini tidaklah dianggap sebagai suatu yang signifikan mampu mengurangi kadar produktivitas masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan di laut Natuna.

Meski belum menjadi suatu kekhawatiran yang signifikan bagi masyarakat nelayan atau juga aparat yang berwenang langsung dalam kerangka

Implementasi Kebijakan pengelolaan sumber daya laut Natuna, Konflik laut china selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini menurut masyarakat tidak menjadi kendala dan menganggap itu sebagai isu sepihak Cina, sehingga tidak memerlukan respon dan tanggapan berlebihan masyarakat bagi seluruh pihak di Wilayah Kabupaten Natuna, serta gangguan stabilitas kawasan di masa yang akan datang.

Kabupaten Natuna merupakan kehidupan sosial di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga Malaysia (Serawak) akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik laut china selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di laut china selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di laut china selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan laut china selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan laut china selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut china selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara (Nainggolan, 2013).

Berbagai pandangan mengenai pentingnya Pengelolaan sumber daya laut merupakan dari bagian terpenting sebagai bagian dari penjawantahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai bagian upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk seluruh kepentingan negara. Sebagai daerah yang ada di perbatasan, Kabupaten Natuna selama ini menjadi isu strategis sehingga harus menghasilkan perhatian diarahkan pada pembangunan yang dilakukan dan berdampak bagi perkembangan perekonomian masyarakat secara umum. Sehingga kepentingan tersebut menjadi kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di kawasan pulau kecil terluar menjadikan daya beli masyarakat rendah karena akses yang sangat terbatas sehingga sentuhan pembangunan menjadi alternatif terpenting dalam menjaga kedaulatan untuk merubah kondisi dan keadaan masyarakat secara terpadu. Sehingga Sentuhan pembangunan ekonomi yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan sumber daya perekonomian di pulau terluar. Sentuhan pembangunan ekonomi akan mampu memperluas peluang usaha, memperkuat kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat diperlukan distribusi yang terintegrasi dengan berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Anderson, James E, 1984. *Public Policy Making-An Introduction* (second edition), Texas A & M University.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (ed.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Dunn, N. William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik "Proses, Analisis dan Partisipasi"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hoogerwerf, 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Howlett, Michael., and M. Ramesh, 1995. *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*, New York: Oxford University Press.
- Huberman, Michael dan Matthew B. Miles. 1994. "Data Management and Analysis methods", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Islamy Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, 1977, *An Introduction To The Study of Public Policy Publishing Company Monterey, California: Wesley Longman Publishing Company, Inc.*
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Nainggolan, P. P, 2013, *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. *Manajemen*, Edisi Kesepuluh. Jakarta: penerbit Erlangga
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisng.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E., 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.
- Wilson, Bangun, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga. Jakarta

5. Kesimpulan

Sebagai negara maritim pulau dan laut sebagai sumber daya alam yang harus dimanfaatkan dan dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas, dan khususnya masyarakat dipulau terluar yang jauh dari konektivitas pembangunan. Pengelolaan sumber daya laut mesti mengacu kepada kepentingan masyarakat lokal dan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada dipulau tersebut.

Pengelolaan potensi, sumber daya laut akan membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara dengan memperhatikan unsur kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan sehingga perencanaan yang disusun sesuai dalam pelaksanaannya.